



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### **SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL KALIMANTAN**

Hari Selasa, tanggal 8 Juli 2008  
Di Hotel Kapuas Palace Pontianak

- Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
- Yth. Sdr. Para Pejabat Eselon II Departemen Kehutanan.
- Yth. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi se-Kalimantan.
- Yth. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi se-Kalimantan.
- Yth. Sdr. Kepala Dinas yang mengurus bidang Kehutanan Kabupaten/  
Kota se-Kalimantan.
- Yth. Kepala UPT/Balai Lingkup Departemen Kehutanan para Undangan,  
Peserta Rapat dan Hadirin yang saya hormati.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan saya ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri acara Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional se-Kalimantan Tahun 2008.

Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, ijin saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Departemen Kehutanan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan Rakorenbanghutreg ini, untuk itu kepada para peserta yang berasal dari luar Kalimantan Barat saya ucapkan setamat datang di Kota Khatulistiwa.

Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengelolaan sumber daya hutan selama beberapa dekade, mulai dari tahun tujuh puluhan hingga tahun sembilan puluhan, sektor kehutanan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional.

Sumber daya hutan pada dekade tersebut telah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah dan penerimaan negara, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar terutama pada kegiatan industri pengolahan kayu yang tumbuh dengan pesat.

Namun demikian, kita menyadari pula bahwa pengelolaan sumber daya hutan pada masa lalu yang lebih berorientasi pada peningkatan produksi kayu untuk pembangunan ekonomi nasional, ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tercermin dari kenyataan yang kita saksikan sekarang ini yaitu terjadinya deforestasi dan degradasi.

Degradasi dan deforestasi sebagai akibat pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan aspek ekologi dan sosial pada masa lalu telah berdampak terhadap penurunan kualitas ekologis yang menyebabkan banjir, kekeringan dan pemanasan global yang akhir-akhir ini menjadi isu sentral pada tingkat nasional maupun internasional.

Selain dari pada itu penurunan kualitas hutan juga mengakibatkan menurunnya kemampuan sumber daya hutan untuk menyediakan bahan baku bagi keperluan industri primer kehutanan, sehingga banyak industri yang tutup karena kekurangan bahan baku dan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta tidak tersedianya kayu untuk keperluan pembangunan daerah dan masyarakat.

Hadirin peserta Rakor yang saya hormati,

Saat ini di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tercatat  $\pm 5,2$  juta Ha lahan yang tergolong kritis atau tidak produktif baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dan  $\pm 2,5$  juta Ha di antaranya perlu segera direhabilitasi. Sementara itu, upaya rehabilitasi selama ini yang hanya mengandalkan pembiayaan dari DAK-DR maupun Gerhan jelas tidak memadai untuk mengimbangi laju kerusakan hutan yang terjadi. Pembangunan hutan tanaman yang diharapkan dapat diandalkan belum berhasil dengan baik. Akibatnya degradasi dan deforestasi hutan yang terus terjadi tidak mampu diimbangi dengan upaya rehabilitasi kawasan hutan yang memadai.

Oleh karena itu kebijakan Departemen Kehutanan untuk melakukan revitalisasi sektor kehutanan harus kita sambut dengan baik salah satunya adalah melalui pembangunan hutan tanaman dengan melibatkan investor.

Untuk mempercepat upaya rehabilitasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk meninjau kembali HPHTI yang tidak aktif, dan telah melakukan identifikasi terhadap lahan yang tidak produktif dalam kawasan hutan seluas  $\pm 1$  juta Ha untuk diarahkan kepada investor yang berminat dalam bidang pembangunan hutan tanaman.

Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian.

Memperhatikan uraian yang telah saya sampaikan di atas, maka melalui Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional se-Kalimantan ini saya berharap dapat dibahas issue-isue aktual yang strategis dan solusi penyelesaiannya antara Lain:

1. Sinkronisasi RTRWP dengan peta Penunjukan Kawasan Hutan.

Pada saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan kepada Menteri Kehutanan mengenai Revisi RTRWP untuk dipaduserasikan kembali dengan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan . Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Lain.

Revisi RTRWP tersebut perlu segera di lakukan dengan pertimbangan: Adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota, meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lain, terdapatnya kawasan hutan yang sudah tidak berhutan dan terdapatnya hasil tata batas yang secara fisik tidak sesuai dengan yang tergambar pada peta penunjukan kawasan hutan.

Dalam kaitan ini diharapkan Departemen Kehutanan secara arif dan bijaksana mengakomodir revisi RTRWP yang diajukan oleh daerah.

Di sisi lain pemerintah kabupaten diharapkan dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan perizinan sektor lain di dalam kawasan hutan sebelum adanya perubahan peta penunjukan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, karena akan menimbulkan konsekuensi hukum.

## 2. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Guna mewujudkan revitalisasi sektor kehutanan maka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, baik melalui DAK-DR, Gerhan maupun investor dengan tetap melibatkan masyarakat setempat. Hal ini mengingat potensi tegakan hutan alam pada Kawasan Hutan Produksi sudah jauh berkurang, di sisi lain luas lahan kritis setiap tahunnya terus meningkat.

Oleh karena itu untuk mengatasi kekurangan bahan baku industri pengolahan kayu, maka kita harus mampu mendorong terwujudnya pembangunan hutan tanaman sebagai pengganti tegakan hutan alam.

Dalam upaya mempercepat pembangunan hutan tanaman oleh investor, diharapkan Departemen Kehutanan dapat melakukan regulasi proses perijinan IUPHHK Hutan Tanaman. Sudah barang tentu daerah juga berkewajiban menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.

## 3. Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.

Paradigma pemanfaatan hasil hutan ke depan harus bergeser dari orientasi pada hasil hutan kayu menjadi hasil hutan non kayu.

Saya yakin Pulau Kalimantan memiliki potensi hasil hutan bukan kayu/non kayu yang cukup besar seperti : Gaharu, Madu Hutan, Rotan, Getah, Kulit Kayu dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan. Apabila hasil hutan bukan kayu ini dikelola dengan baik, tentu akan menjadi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar hutan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada hasil hutan kayu.

#### 4. Pemenuhan kebutuhan kayu lokal.

Kebutuhan kayu untuk pembangunan daerah dan masyarakat setiap tahun cenderung terus meningkat, sedangkan persediaan kayu di pasaran lokal sangat terbatas bahkan hampir tidak tersedia. Hal ini terjadi karena pemerintah belum mampu menyediakan kayu yang legal dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Menyadari bahwa kebijakan pemberian perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka diharapkan adanya regulasi kebijakan dari Departemen Kehutanan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal tersebut.

Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian.

Dari beberapa isue-isue strategis yang saya sampaikan di atas, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan agar rapat koordinasi ini bukan semata-mata hanya acara seremonial, tetapi diharapkan dapat menghasilkan suatu rumusan kebijakan dan program-program yang realistis dan implementatif, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan sinergisitas di antara para *stakeholder* pembangunan serta mampu mengatasi permasalahan yang timbul khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan.

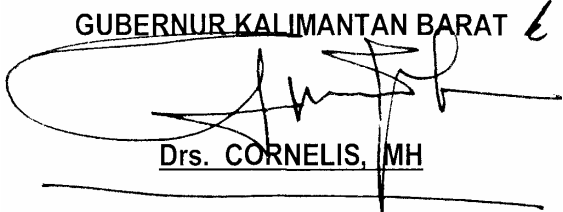
Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa semua permasalahan yang mengemuka dan solusi yang dihasilkan, serta rencana kerja yang dirumuskan dapat diakomodir dan menjadi bagian dari rencana kerja Departemen Kehutanan, sehingga pada gilirannya akan tercipta sinergisitas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Rakorenbanghutreg ini dapat dijadikan sebagai forum untuk berbagi informasi, pengalaman, gagasan serta media untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat jiwa karsa para Rimbawan baik yang berkarya di pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Semoga Tuhan Yang Kuasa selalu memberikan perlindungan serta petunjukNya kepada kita semua untuk dapat berbuat yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat kita.

Demikian sambutan saya dan selanjutnya "Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional Kalimantan Tahun 2008, dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi".

Selamat berdiskusi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**   
Drs. CORNELIS, MH